



Optimalisasi JPD

Atasi Persoalan Pendidikan

JOGJA--Dinas Pendidikan (disdik) Kota Jogja akan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pendanaan bagi para siswa yang ada di sekolah.

"Sehingga proses belajar mengajar di sekolah tidak terhambat dengan masalah pendanaan pendidikan," ungkap Kepala Disdik Kota Jogja, Edy Heri Suasana M Pd kepada Bemas Jogja di kantornya, Senin (16/12).

Menurut Edy, dalam menghadapi

waktu ujian akhir semester (UAS) kali ini, diharapkan para pelajar di kota Jogja dapat mengikuti dengan baik tanpa harus terganggu dengan persoalan pembayaran yang ada di sekolah. Sebab siswa seringkali tidak diperkenankan untuk dapat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) atau UAS karena alasan belum melunasi tunggakan tertentu.

"Hal inilah yang akan diatasi disdik melalui UPT Jaminan Pendidikan Daerah sehingga proses belajar yang dilakukan siswa tidak akan terganggu," ujarnya.

Edy menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan surat kepada seluruh sekolah setingkat SMA dan SMK Negeri se-Kota Jogja terkait hal tersebut. Dalam surat edaran tersebut Disdik meminta sekolah untuk tidak menghambat proses KBM yang ada di sekolah karena permasalahan dana pendidikan.

Sekolah bisa melakukan koordinasi dengan pihak dinas melalui UPT JPD untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka juga tidak diperkenankan untuk mengaitkan antara kewajiban pendanaan orangtua atau

wali siswa dengan proses KBM seperti ujian akhir semester, penerimaan rapor dan kelulusan.

"Sekolah juga tidak diperkenankan menahan ijazah," tandasnya.

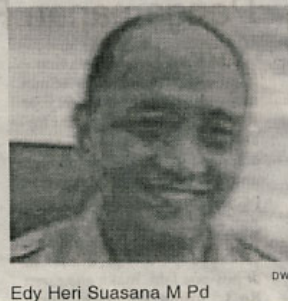
Edy menegaskan, kepala sekolah diharapkan dapat mengkomunikasikan kebijakan hal tersebut kepada seluruh guru dan karyawan. Dengan demikian berbagai keluhan terhadap hal tersebut dapat diminimalisir.

"Pemerintah kota Jogja berkomitmen memberikan layanan pendidikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat dan warga kota

Jogja," jelasnya.

Sementara wali siswa, Sri Eka K mengemukakan, pihaknya merasa senang dengan adanya kebijakan pemerintah kota tersebut. Kebijakan itu membuat para orangtua siswa menjadi lebih tenang dalam memantau pendidikan para anak-anaknya.

"Anak kami juga tidak akan merasa minder manakala belum dapat melunasi kewajiban pembayaran. Diharapkan prestasi belajar para siswa akan menjadi semakin meningkat," ujar ibu yang bersekolah di SMAN 7 Jogja ini. (dwi)



Edy Heri Suasana M Pd

dwi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005